

1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																									Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																									Memadai
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas	3	4	4	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																									Memadai
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3		3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3		3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3		3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis	3	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	4	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah	3	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	4	3	4	3	3	4	3	3		3	3	4	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																									Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3		3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4		3	3	4	3	Memadai

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden
Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
 - 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi belum konsisten
 - 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
 - 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

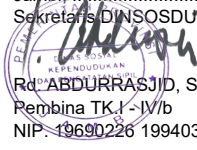
Misal:
kesimpulan tiap pertanyaan :
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden
- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Provinsi Jambi

Nama Pemda : Provinsi Jambi (Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil)			
Tahun Penilaian : 2024			
Urusan Pemerintahan : Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	
1	LHP-BPK RI Tahun 2021	1 Temuan Belanja Hibah pada lima SKPD tidak sesuai dengan ketentuan 2 Pencairan Belanja Hibah Uang pada 2 SKPD tidak dilaksanakan dengan mekanisme LS 3 Pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) tidak sesuai ketentuan 4 kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum atas PNS yang melaksanakan cuti besar sebesar Rp. 63.420.000 5 Pengelolaan Belanja jasa konsultasi pada tujuh SKPD tidak sesuai ketentuan 6 komposisi BLNP pada 2 SKPD tidak sesuai ketentuan 7 Pembayaran belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia pada 11 SKPD tidak sesuai ketentuan 8 Belanja Honorarium Panitia pada Dinsosdukcapii Menggunakan satuan orang/hari 9 Pembayaran belanja honorarium pada tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan pada 14 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan 10 belanja honorarium panitia pada 2 SKPD menggunakan tarif TPK	Penegakan Integritas Etika
2	LHP Inspektorat	Pengamanan Fisik Terhadap Kendaraan Dinas Operasional Tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kendaraan Dinas Operasional yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dengan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional.	Penegakan Integritas Etika
3	Media Massa		
4	DII.		


Jambi,
Sekretaris DINSOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRASJID, S.Sos
Pembina TK. I - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Nama Pemda : Provinsi Jambi (Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		Tahun Penilaian : 2024					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	kurang Memadai	1. Temuan Belanja Hibah pada lima SKPD tidak sesuai dengan ketentuan 2. Pencairan Belanja Hibah Uang pada 2 SKPD tidak dilaksanakan dengan mekanisme LS 3. Pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) tidak sesuai ketentuan 4. kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum atas PNS yang melaksanakan cuti besar sebesar Rp. 63.420.000 5. Pengelolaan Belanja jasa konsultasi pada tujuh SKPD tidak sesuai ketentuan 6. komposisi BLNP pada 2 SKPD tidak sesuai ketentuan 7. Pembayaran belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia pada 11 SKPD tidak sesuai ketentuan 8. Belanja Honorarium Panitia pada Dinsosdukcapiil Menggunakan satuan orang/hari 9. Pembayaran belanja honorarium pada tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan pada 14 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan 10. belanja honorarium panitia pada 2 SKPD menggunakan tarif TPK 11. Pengamanan Fisik Terhadap Kendaraan Dinas Operasional Tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kendaraan Dinas Operasional yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional.	Memadai	-	Memadai	1. Temuan Belanja Hibah pada lima SKPD tidak sesuai dengan ketentuan 2. Pencairan Belanja Hibah Uang pada 2 SKPD tidak dilaksanakan dengan mekanisme LS 3. Pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) tidak sesuai ketentuan 4. kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum atas PNS yang melaksanakan cuti besar sebesar Rp. 63.420.000 5. Pengelolaan Belanja jasa konsultasi pada tujuh SKPD tidak sesuai ketentuan 6. komposisi BLNP pada 2 SKPD tidak sesuai ketentuan 7. Pembayaran belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia pada 11 SKPD tidak sesuai ketentuan 8. Belanja Honorarium Panitia pada Dinsosdukcapiil Menggunakan satuan orang/hari 9. Pembayaran belanja honorarium pada tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan pada 14 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan 10. belanja honorarium panitia pada 2 SKPD menggunakan tarif TPK 11. Pengamanan Fisik Terhadap Kendaraan Dinas Operasional Tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kendaraan Dinas Operasional yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional.
2	KOMITMEN TERHADAP	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
3	KEPEMIMPINAN YANG	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
5	PENDELEGASIAN	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
6	PENYUSUNAN DAN	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
7	PERWUJUDAN PERAN	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
8	HUBUNGAN KERJA YANG	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-

Jambi
Sekretaris DIN SOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRASJID, S.Sos
Pembina TK.I - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi


Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Provinsi Jambi	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: 2021 - 2026	
Sumber Data	RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis RPJMD	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2.Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
Nama Dinas Terkait	Rumah Sakit Jiwa (RSJ), RSUD, DINKES, SATPOL PP,	
Sasaran RPJMD	1.1. Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2.1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2.2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.3. Meningkatnya Partisipasi Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)	
IKU Sasaran RPJMD	1.1.1. Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil 1.1.2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.1.3. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 2.1.1. Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2.2.1. Jumlah PPKS yang Memperoleh Pelindungan dan Jaminan Sosial 2.3.1. JumlahPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) yang Berperan Aktif	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Anak Terlantar 5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis Pemda: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Strategis Pemda: 1.1. Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2.1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2.2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.3. Meningkatnya Partisipasi Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) IK Sastra Pemda: 1.1.1. Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil 1.1.2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.1.3. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 2.1.1. Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2.2.1. Jumlah PPKS yang Memperoleh Pelindungan dan Jaminan Sosial 2.3.1. JumlahPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) yang Berperan Aktif	
		Provinsi Jambi, Juli 2023 Gubernur Jambi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jambi		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Sumber Data	Renstra DINSOSDUKCAPIL Provinsi Jambi Tahun 2016-2021		
Tujuan Strategis	1. Menurunnya Angka PPKS Kewenangan dengan indikator Kinerja Persentase penurunan PPKS. 2. Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Kinerja Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan. 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas.		
Sasaran Strategis	1.1. Meningkatnya pelayanan rehabilitas sosial 1.2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.3. Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial 2.1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan 3.1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
IKU Renstra OPD		IKU	2023
	1.1.1	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	405
	1.1.2	Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	10075
	1.1.3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Berperan Aktif	1854/5
	2.1.1	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	99,5
	2.1.2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99%
	2.1.3	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	30%
	3.1.1	Predikat AKIP	71,46%
	3.1.2	Nilai IKM	86
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis OPD: 1. Menurunnya Angka PPKS Kewenangan dengan indikator Kinerja Persentase penurunan PPKS. 2. Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Kinerja Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan. 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas. Sasaran Strategis OPD: 1.1. Meningkatnya pelayanan rehabilitas sosial 1.2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.3. Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial 2.1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan 3.1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik IK Sasaran Strategis OPD: 3.1. Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial 3.2. Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.3. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Berperan Aktif 3.4. Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil 3.5. Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3.6. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 3.7. Predikat AKIP 3.8. Nilai IKM		
		Jambi, Sekretaris DINSOSDUKCAPIL  Rd. ABDURRASJID, S.Sos Pembina TK.I - IV/b NIP. 19690226 199403 1 002	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jambi		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Sumber Data	Renja/RKA DINSOSDUKCAPIL Tahun 2023		
Tujuan Strategis	1. Menurunnya Angka PPKS Kewenangan dengan indikator Kinerja Persentase penurunan PPKS. 2. Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Kinerja Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan.		
Program Dinsosdukcapi (Renja/RKA 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 8. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 9. PROGRAM PENCATATAN SIPIL 10. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 11. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
Capaian/Hasil Program	1.1	Nilai SAKIP	BB Predikat
	2.1	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program Kessos	5%
	3.1	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	25%
	4.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai SPM dan meningkat	0.5%
	5.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.50%
	6.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	100%
	7.1	Persentase pewujudan Nilai nilai Kepahlawanan	50%
	8.1	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	98%
	9.1	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	94%
	10.1	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%
	11.1	Persentase Pengelolaan Profile kependudukan	100%
Informasi Lain	-		
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 8. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 9. PROGRAM PENCATATAN SIPIL 10. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 11. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		


<p>Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<div>Kegiatan: 2.2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 3.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/kota 4.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti 4.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 4.3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Dalam Panti 4.4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 4.5 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di dalam Panti 5.1 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 5.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 6.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 7.1 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 8.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 9.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 10.2 Penyelenggaraan PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan Provinsi 10.3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 11.1 Penyediaan Profil Kependudukan</div> <div>Indikator/Hasil Kegiatan: 2.2.1. Persentase PSKS yang terlibat dalam Pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3.1.1. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 4.1.1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti 4.2.1. Persentase Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti 4.3.1. Persentase Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti 4.4.1. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti 4.5.1. Persentase Tuna Susila yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti 5.1.1. Persentase Pengangkatan anak antar WNI dan oleh Orangtua Tunggal 5.2.1. Persentase kab/kota yang aktif pemutakhiran DTKS 6.1.1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial 7.1.1. Persentase Penyelamatan Asset Taman Makam Pahlawan 8.2.1. Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 9.2.1. Persentase Penyelenggaraanpencatatan sipil 10.2.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 10.3.1. Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan 11.1.1. Penyediaan Profil Kependudukan</div>
	<div>Jambi Sekretaris DINSOSDUKCAPIL  Rd. ABDURRASJID, S.Sos Pembina TK.1 - IV/b NIP. 19690226 199403 1 002</div>

Formulir Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

[illegible]

2.1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	2.1.1. Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Penurunan Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	RSP.23.06.1 0.01	Gubernur	- Petugas kurang teliti - Petugas Kurang paham	Internal	C	Update dan Validasi data PPKS Tidak Tercapai	Pemda, Masyarakat
2.2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.2.1. Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penurunan Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	RSP.23.06.1 0.02	Gubernur	- Petugas kurang teliti - Petugas Kurang paham	Internal	C	Update dan Validasi data PPKS Tidak Tercapai	Pemda, Masyarakat
2.3	Meningkatnya Partisipasi Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)	2.3.1. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif	Penurunan Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Berperan Aktif	RSP.23.06.1 0.03	Gubernur	- Petugas kurang teliti - Petugas Kurang paham	Internal	C	Update dan Validasi data PPKS Tidak Tercapai	Pemda, Masyarakat

Jambi.....
Sekretaris DINSOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRASJID, S.Sos
Pembina TK.I - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan

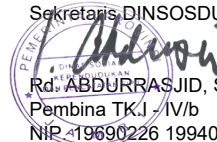
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jambi
Nama OPD	: Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2021-2026
Tujuan Strategis Pemda	: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis OPD: Menurunnya Angka PPKS Kewenangan dengan indikator Kinerja Persentase penurunan PPKS	Persentase Penurunan PPKS		ROO.23.06 .10.01						
1.1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	ROO.23.06 .10.01	KEPALA UPTD PSBAWEP	Penerima Manfaat dalam Panti ada yang berkurang atau bertambah	Internal	C	Tidak efisien dan efektif	Penerima manfaat dalam panti
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Kemungkinan tidak tepat sasaran - Verifikasi tidak dilaksanakan dengan benar - Pengadaan tidak sesuai spesifikasi	ROO.23.06 .10.01	- Kabid Linjamsos - Kabid PFM	- Petugas kurang teliti - Pejabat pengadaan kurang memahami	Internal	C	- Tidak sesuai antara spek dan barang yang di proses pengadaannya - Tidak tepat sasaran	Masyarakat
	Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Berperan Aktif	- Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran - PSM belum mewakili desa/kelurahan domisi	ROO.23.06 .10.01	Kabid Dayasos	Adanya kepentingan tertentu	Internal	C	Tidak tepat sasaran	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Masyarakat
	Tujuan Strategis OPD: Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan 2 indikator Kinerja Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan			ROO.23.06 .10.02						

2.1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Masih terbatasnya fasilitas pendukung di daerah guna peningkatan pelayanan Dukcapil	ROO.23.06.10.02	Bidang Dukcapil	Keterbatasan anggaran yang tersedia	Internal	C	Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil	Bidang dukcapil
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan	ROO.23.06.10.02	Bidang Dukcapil	kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam mensuport pelayanan Adminduk di daerah	Internal	C	Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk	Bidang dukcapil
		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Pelaksanaan PIAK di kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya	ROO.23.06.10.02	Bidang Dukcapil	Kurang adanya pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/kota	Internal	C	Belum optimalnya pelayanan berupa data kependudukan	Bidang dukcapil
3	Tujuan Strategis OPD: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik Berkualitas									
3.1	Sasaran Strategis OPD: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat AKIP	Tidak tercapainya nilai target AKIP	ROO.23.06.10.03	Dinas Sosdukcapil	Terbatasnya waktu	Internal	C	Tidak efisien dan efektif	Dinas Sosdukcapil
3.2	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Tidak tercapainya nilai target IKM	ROO.23.06.10.03	Dinas Sosdukcapil	Terbatasnya waktu	Internal	C	Tidak efisien dan efektif	Dinas Sosdukcapil

Jambi,
 Sekretaris DINSOSDUKCAPIL

 Rd. ABDURRASJID, S.Sos
 Pembina TK.I - IV/b
 NIP. 19690226 199403 1 002

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum


Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jambi										
Nama OPD	: Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Tahun Penilaian	: 2024										
Periode yang dinilai	: 2021-2026										
Tujuan Strategis Pemda	: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.										
Sasaran strategis OPD	: 1.1. Meningkatnya pelayanan rehabilitas sosial 1.2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.3. Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial 2.1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan 3.1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik										
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi										
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil										

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang terlibat dalam Pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran dan Pemotongan Tali Asih	ROO.23.06.10.02	Bidang Pemberdayaan Sosial	KKN, Adanya Kepentingan Tertentu	Internal	C	Tali Asih yang diterima PSM Berkurang (tidak sesuai dengan besaran Jumlah)	PSM (Pekerja Sosial masyarakat)
3.1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Pengangkatan anak antar WNI dan oleh Orangtua Tunggal	Pelaksanaan	Pemalsuan Dokumen	ROO.23.06.10.03	Kabid Rehabilitasi Sosial	- Petugas kurang teliti - Petugas kurang paham Proses Pengajuan Ijin Adopsi dan Sidang COTA (Calon Orangtua Asuh) - KKN	Internal	C	- Terjadi Proses Adopsi yang tidak sesuai aturan yang berlaku	- Calon Orang Tua Asuh - Calon Anak Asuh
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang aktif pemutakhiran DTKS	Pelaksanaan	Kemungkinan Resiko Sosial Yang Lebih Besar lagi	ROO.23.06.10.04	KABID PFM	Minimnya Bantuan yang Menyasar Langsung ke Masyarakat Kelompok Miskin	Internal	C	Data Tidak Update, sehingga ada kemungkinan tidak tepat sasaran	Masyarakat
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Pelaksanaan	Pengadaan Buffer stock permakanan tidak sesuai spesifikasi dan Mark Up harga	ROO.23.06.10.05	Kabid Perlinjamsos	- KKN - Pejabat Pengadaan kurang memahami	Internal	C	- Tidak sesuai antara spek dan barang yang di proses pengadaannya - KKN	- Masyarakat korban bencana

6.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselarkaskan dengan aturan	ROO.23.06.10.06	Bidang Dukcapil	Keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang ditemui dalam administrasi kependudukan	Internal	C	- Tidak efisien dan efektif	Masyarakat
7.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	Pelaksanaan	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	ROO.23.06.10.07	UPTD PSBAWEP "Harapan Mulya"	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	Internal	C	- Tidak efisien dan efektif	- Penerima manfaat dalam panti
8.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	Pelaksanaan	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	ROO.23.06.10.08	UPTD PSBAWEP "Harapan Mulya"	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	Internal	C	- Tidak efisien dan efektif	- Penerima manfaat dalam panti
9.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	Pelaksanaan	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan Jumlah Penerima manfaat dalam panti	ROO.23.06.10.09	UPTD PSTW "BUDI LUHUR"	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	Internal	C	- Tidak efisien dan efektif	- Penerima manfaat dalam panti
10.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	Pelaksanaan	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	ROO.23.06.10.10	UPTD PSBAWEP "Harapan Mulya"	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	Internal	C	- Tidak efisien dan efektif	- Penerima manfaat dalam panti
11.1	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Tuna Susila yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	Pelaksanaan	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	ROO.23.06.10.11	UPTD PSBAWEP "Harapan Mulya"	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	Internal	C	- Tidak efisien dan efektif	- Penerima manfaat dalam panti

Jambi,
Sekretaris DINSOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRASJID, S.Sos
Pembina TK.I - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Analisis Risiko
Risiko Strategis OPD

Risiko			Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	Verifikasi tidak dilaksanakan dengan benar	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi	Kemungkinan tidak tepat sasaran	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran	PSM belum mewakili desa/kelurahan domisi	Masih terbatasnya fasilitas pendukung di daerah guna peningkatan pelayanan Dukcapil	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan	Pelaksanaan PIAK di kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya	Tidak tercapainya nilai target AKIP	Tidak tercapainya nilai target IKM											
No.	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO 1		RSO 2		RSO 3		RSO 4		RSO 5		RSO 6		RSO 7		RSO 8		RSO 9		RSO 10		RSO 11	
			Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungkin an	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan	Dampak	Kemungki nan
a	b	c	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e
1	Kadis	DINSOSDUKCAPIL	5	4	4	3	4	3	5	3	5	3	3	3	4	3	3	2	3	2	4	2	4	2
2	Sekdis	DINSOSDUKCAPIL	4	4	4	4	5	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	2
3	Kabid 1	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3
4	Kabid 2	DINSOSDUKCAPIL	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	2	3	2	2
5	Kabid 3	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	3	4	3	5	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
6	Kabid 4	DINSOSDUKCAPIL	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3
7	Kasi 1	DINSOSDUKCAPIL	5	2	4	3	3	2	4	2	4	2	2	2	4	2	4	2	3	3	5	2	5	2
8	Kasi 2	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	3	4	3	4	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
9	Kasi 3	DINSOSDUKCAPIL	4	2	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	3	3	3	2	2	2	4	2	4	2
10	Kasi 4	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	4	3	4	3	4	2	4	2	4	2
11	Kasi 5	DINSOSDUKCAPIL	5	3	4	3	4	2	5	3	4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
12	Kasi 6	DINSOSDUKCAPIL	4	2	3	2	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	4	2	4	2
13	Kasubbag 1	DINSOSDUKCAPIL	5	3	3	2	5	2	5	3	5	3	2	2	3	3	3	2	2	2	5	2	2	2
14	Kasubbag 2	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3
15	Kasubbag 3	DINSOSDUKCAPIL	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	3	3	2	3	3	5	3	5	3
	Rata-rata		3.93	2.93	3.33	2.80	3.93	2.60	4.13	2.93	3.93	2.73	2.73	2.40	3.33	2.60	3.13	2.33	2.93	2.33	3.87	2.27	3.60	2.27

Kriteria Risiko			
Kriteria Kemungkinan		Kriteria Dampak	
Kemungki	n	Nilai Dampak	Keterangan
1	Jarang	1	Signifikan
2	Jarang	2	Signifikan
3	Kadang	3	Sedang
4	Sering	4	Signifikan
5	Sering	5	Signifikan

Kertas Kerja
Analisis Risiko
Risiko Operasional OPD

Risiko			Adanya Penyalahgunaan Ijin		Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran dan Pematongan Tali Asih		Pemalsuan Dokumen		Kemungkinan Resiko Sosial Yang Lebih Besar lagi		Pengadaan Buffer stock permakanan tidak sesuai spesifikasi dan Mark Up harga		Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan		Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP		Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP		Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR"		Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP		Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	
No.	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	ROO 1		ROO 2		ROO 3		ROO 4		ROO 5		ROO 6		ROO 7		ROO 8		ROO 9		ROO 10		ROO11	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
a	b	c	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e
1	Sekdis	DINSOSDUKCAPIL	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
2	Kabid 1	DINSOSDUKCAPIL	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2
3	Kabid 2	DINSOSDUKCAPIL	3	2	3	2	3	3	3	2	2	1	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Kabid 3	DINSOSDUKCAPIL	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Kabid 4	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	2	2	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Kasi 1	DINSOSDUKCAPIL	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
7	Kasi 2	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
8	Kasi 3	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Kasi 4	DINSOSDUKCAPIL	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
10	Kasi 5	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Kasi 6	DINSOSDUKCAPIL	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
12	Kasubbag 1	DINSOSDUKCAPIL	2	2	1	1	2	2	3	3	1	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3
13	Kasubbag 2	DINSOSDUKCAPIL	2	3	2	2	2	2	3	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
14	Kasubbag 3	DINSOSDUKCAPIL	3	2	2	1	2	3	3	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Staf 1	DINSOSDUKCAPIL	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
16	Staf 2	DINSOSDUKCAPIL	3	2	3	2	3	3	3	3	4	2	3	2	4	3	4	2	4	2	3	2	4	2
17	Staf 3	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	2	4	3	3
18	Staf 4	DINSOSDUKCAPIL	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Rata-rata		2.78	2.50	2.78	2.22	2.72	2.56	2.89	2.67	2.44	1.78	2.78	2.83	2.89	2.72	2.89	2.72	2.83	2.67	2.67	2.56	2.89	2.67

Kriteria Risiko			
Kriteria Kemungkinan		Kriteria Dampak	
Kemungki	n	Nilai Dampak	Keterangan
1	Jarang	1	Signifikan
2	Jarang	2	Signifikan
3	Kadang	3	Sedang
4	Sering	4	Signifikan
5	Sering	5	Signifikan

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda
Tahun Penilaian

: Provinsi Jambi
: 2024

Tujuan Strategis Pemda

: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Tujuan Strategis OPD

: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan akuntabel
: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Urusan Pemerintahan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Sulitnya melaksanakan pendataan Penduduk non permanen yang disebabkan penduduk tsb tidak melaporkan identitasnya dan Penduduk rentan yang disebabkan penduduk sulit untuk didata terkait tempat tinggal/ berpindah-pindah	RSP.23.06.10.01			
II	Risiko Strategis OPD 1:				
1	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	RSO.23.06.10.01	3.93	2.93	11.51
2	Verifikasi tidak dilaksanakan dengan benar	RSO.23.06.10.02	3.33	2.80	9.32
3	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi	RSO.23.06.10.03	3.93	2.60	10.22
4	Kemungkinan tidak tepat sasaran	RSO.23.06.10.04	4.13	2.93	12.10
5	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran	RSO.23.06.10.05	3.93	2.73	10.73
6	PSM belum mewakili desa/kelurahan domisi	RSO.23.06.10.06	2.73	2.40	6.55
7	Masih terbatasnya fasilitas pendukung di daerah guna peningkatan pelayanan Dukcapil	RSO.23.06.10.07	3.33	2.60	8.66
8	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan	RSO.23.06.10.08	3.13	2.33	7.29
9	Pelaksanaan PIAK di kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya	RSO.23.06.10.09	2.93	2.33	6.83
10	Tidak tercapainya nilai target AKIP	RSO.23.06.10.10	3.87	2.27	8.78
11	Tidak tercapainya nilai target IKM	RSO.23.06.10.11	3.60	2.27	8.17
III	Risiko Operasional OPD 1:				
1	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran dan Pemotongan Tali Asih	ROO.23.06.10.02	2.78	2.22	6.17
2	Pemalsuan Dokumen	ROO.23.06.10.03	2.72	2.56	6.96
3	Kemungkinan Risiko Sosial Yang Lebih Besar lagi	ROO.23.06.10.04	2.89	2.67	7.72
4	Pengadaan Buffer stock permakanan tidak sesuai spesifikasi dan Mark Up harga	ROO.23.06.10.05	2.44	1.78	4.34
5	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan	ROO.23.06.10.06	2.78	2.83	7.87
6	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.07	2.89	2.72	7.86
7	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.08	2.89	2.72	7.86
8	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	ROO.23.06.10.09	2.83	2.67	7.56
9	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.10	2.67	2.56	6.84
10	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.11	2.89	2.67	7.72

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Jambi,
Sekretaris DIN SOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRASJID, S.Sos
Pembina TK.I - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002


MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	5					
	Kemungkinan Besar	4					
	Kemungkinan Kecil	3			RSO.23.06.10.01		
					RSO.23.06.10.02		
					RSO.23.06.10.03		
					RSO.23.06.10.04		
					RSO.23.06.10.05		
					RSO.23.06.10.07		
					RSO.23.06.10.08		
					RSO.23.06.10.09		
					RSO.23.06.10.10		
					RSO.23.06.10.11		
	Sangat Jarang	2					
	Sangat Jarang	1					

Tingkat Risiko	Skor	Keterangan
Sangat Rendah	<3	Risiko dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan
Rendah	3,01 - 5	Risiko dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan
Sedang	5,01 - 10	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan pengelolaan, jika ada termasuk tersedianya sumber
Tinggi	10,1 - 15	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan
Sangat Tinggi	15,01 - 25	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan segera

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Provinsi Jambi : 2024 : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
	Sulitnya melaksanakan pendataan Penduduk non permanen yang disebabkan penduduk tsb tidak melaporkan identitasnya dan Penduduk rentan yang disebabkan penduduk sulit untuk didata terkait tempat tinggal/ berpindah-pindah	RSP.23.06.10.01		Gubernur	Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian peristiwa kependudukan yang di alami	Target Pendataan dan Dokumen Kependudukan Tidak Tercapai
II	Risiko Strategis OPD 1					
1.	Jumlah Pengadaan Tidak Sesuai dengan Jumlah Penerima Manfaat dalam Panti	RSO.23.06.10.01	11.51	Kepala Dinsosdukcakil	Penegakan Sanksi atas Peraturan yang berlaku belum maksimal dijalankan	Tidak efisien dan efektif
2.	Verifikasi tidak dilaksanakan dengan benar	RSO.23.06.10.02	9.32	Kepala Dinsosdukcakil	Petugas Kurang Teliti	Tidak Tepat sasaran
3.	Pengadaan tidak sesuai Spesifikasi	RSO.23.06.10.03	10.22	Kepala Dinsosdukcakil	Pejabat Pengadaan Kurang memahami	Tidak sesuai antara spek dan barang yang di proses pengadaannya
4.	Kemungkinan tidak tepat sasaran	RSO.23.06.10.04	12.10	Kepala Dinsosdukcakil	Petugas Kurang Teliti	Tidak Tepat sasaran
5.	Tali Asih yang diberikan tidak tepat Sasaran	RSO.23.06.10.05	10.73	Kepala Dinsosdukcakil	Adanya Kepentingan tertentu	Tidak Tepat sasaran
6.	PSM belum mewakili desa/Kelurahan domisili	RSO.23.06.10.06	6.55	Kepala Dinsosdukcakil	Adanya Kepentingan tertentu	Tidak Tepat sasaran
7.	Masih terbatasnya Fasilitas pendukung di Daerah guna Peningkatan Pelayanan Dukcapil	RSO.23.06.10.07	8.66	Kepala Dinsosdukcakil	Keterbatasan Anggaran yang tersedia	Belum Optimalnya Pelayanan Pencatatan Sipil
8.	Belum maksimalnya Kebijakan Teknis Administrasi Kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselarskan dengan aturan	RSO.23.06.10.08	7.29	Kepala Dinsosdukcakil	Kurang Dukungan Pemerintah daerah dalam mensuport Pelayanan Adminduk di daerah	Belum Optimalnya Pelayanan Pencatatan Sipil
9.	Pelaksanaan PIAK di Kabupaten/Kota tidak berjalan sebagaimana mestinya	RSO.23.06.10.09	6.83	Kepala Dinsosdukcakil	Kurang adanya Pembinaan dan Pengawasan Kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	Belum Optimalnya Pelayanan Pencatatan Sipil
10.	Tidak tercapainya nilai target AKIP	RSO.23.XX.XX.10	8.78	Kepala Dinsosdukcakil	Terbatasnya Waktu	Tidak efisien dan efektif
11.	Tidak tercapainya nilai target IKM	RSO.23.XX.XX.11	8.17	Kepala Dinsosdukcakil	Terbatasnya Waktu	Tidak efisien dan efektif
III	Risiko Operasional OPD 1:					
1	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran dan Pemotongan Tali Asih	ROO.23.XX.XX.02	6.17	Kepala Dinsosdukcakil	KKN, Adanya Kepentingan Tertentu	-
2	Pemalsuan Dokumen	ROO.23.XX.XX.03	6.96	Kepala Dinsosdukcakil	- Petugas kurang teliti - Petugas kurang paham	- Terjadi Proses Adopsi yang tidak sesuai aturan yang berlaku
3	Kemungkinan Resiko Sosial Yang Lebih Besar lagi	ROO.23.XX.XX.04	7.72	Kepala Dinsosdukcakil	KKN	- Tujuan pemberian bantuan tidak tercapai
4	Pengadaan Buffer stock permakanan tidak sesuai spesifikasi dan Mark Up harga	ROO.23.XX.XX.05	4.34	Kepala Dinsosdukcakil	- KKN - Pejabat Pengadaan kurang memahami	- Tidak sesuai antara spek dan barang yang di proses pengadaannya - KKN
5	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselarskan dengan aturan	ROO.23.XX.XX.06	7.87	Kepala Dinsosdukcakil	Kurangnya pemahaman pengguna/OPD dalam memanfaatkan database kependudukan khususnya pendaftaran penduduk	Database kependudukan belum bisa dimanfaatkan denganmaksimal
6	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.XX.XX.07	7.86	Kepala Dinsosdukcakil	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	- Tidak efisien dan efektif
7	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.XX.XX.08	7.86	Kepala Dinsosdukcakil	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	- Tidak efisien dan efektif
8	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	ROO.23.XX.XX.09	7.56	Kepala Dinsosdukcakil	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	- Tidak efisien dan efektif
9	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.XX.XX.10	6.84	Kepala Dinsosdukcakil	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	- Tidak efisien dan efektif
10	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.XX.XX.11	7.72	Kepala Dinsosdukcakil	- Penerima manfaat dalam panti ada yang berkurang atau bertambah	- Tidak efisien dan efektif


Jambi.....
Sekretaris DINSOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRASJID, S.Sos
Pembina TK.I - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002

- Keterangan
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 - Kolom c diisi dengan kode risiko
 - Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)
 - Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
 - Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 - Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Provinsi Jambi					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis Pemda		: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
	Sulitnya melaksanakan pendataan Penduduk non permanen yang disebabkan penduduk tsb tidak melaporkan identitasnya dan Penduduk rentan yang disebabkan penduduk sulit untuk didata terkait tempat tinggal/ berpindah-pindah	RSP.23.06.10.01	Identifikasi dan melaksanakan pemetaan terhadap Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota sehingga didapat solusi dari permasalahan	Pendataan Penduduk Tidak Valid	Dilakukan Pendataan Keliling	Gubernur	TW I 2024
II	Risiko Strategis OPD						
1	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam panti	RSO.23.06.10.01	Menambahkan Anggaran untuk Penerima Manfaat dalam panti	Anggaran terbatas	Dilakukan penambahan anggaran	Kadis Sosdukcakil	TW II 2024
2	Verifikasi tidak dilaksanakan dengan benar	RSO.23.06.10.02	Melakukan Pembinaan	Sosialisasi belum optimal	Membentuk Tim pembinaan dan sosialisasi	Kadis Sosdukcakil	TW II 2024
3	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi	RSO.23.06.10.03	Melakukan pengendalian pengadaan	Kurangnya pemahaman	Memberikan pemahaman dan sosialisasi pengendalian pengadaan	Kadis Sosdukcakil	TW II 2025
4	Kemungkinan tidak tepat sasaran	RSO.23.06.10.04	Melakukan verifikasi pendataan	SDM kurang pemahaman dalam melakukan verifikasi data	Memberikan pelatihan dan pembinaan	Kadis Sosdukcakil	TW II 2026
5	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran	RSO.23.06.10.05	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Anggaran terbatas	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Kadis Sosdukcakil	TW II 2027
6	PSM belum mewakili desa/kelurahan domisi	RSO.23.06.10.06	Melakukan pembinaan bagi PSM	Anggaran terbatas	Melakukan pembinaan bagi PSM Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Kadis Sosdukcakil	TW II 2028
7	Masih terbatasnya fasilitas pendukung di daerah guna peningkatan pelayanan Dukcapil	RSO.23.06.10.07	Menambahkan Anggaran Fasilitas Pendukung Pelayanan Dukcapil	Anggaran terbatas	Menambah anggaran fasilitas pendukung pelayanan dukcapul dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Kadis Sosdukcakil	TW II 2029
8	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan	RSO.23.06.10.08	Identifikasi dan mencari solusi terhadap segala sesuatu yang berimplikasi terhadap kebijakan teknis	Belum ditemukannya solusi yang tepat terhadap kebijakan teknis yang harus diambil	Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Kadis Sosdukcakil	TW II 2030
9	Pelaksanaan PIAK di kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya	RSO.23.06.10.09	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan secara intensif Kabupaten/Kota, dan berkoordinasi serta konsultasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota	anggaran terbatas, kurangnya fasilitasi	fasilitasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara intensif kab/kota dan berkoordinasi serta konsultasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota	Kadis Sosdukcakil	TW II 2031
10	Tidak tercapainya nilai target AKIP	RSO.23.06.10.10	Melaksanakan pengolahan data untuk dapat meningkatkan nilai AKIP	Kekurangan data dukung yang mampu meningkatkan nilai AKIP	Memperkuat data dukung	Kadis Sosdukcakil	TW II 2032
11	Tidak tercapainya nilai target IKM	RSO.23.06.10.11	Meningkatkan pelayanan dan pengolahan data untuk meningkatkan nilai IKM	Kekurangan data dukung yang mampu meningkatkan nilai IKM	Memperkuat data dukung	Kadis Sosdukcakil	TW II 2033
III	Risiko Operasional						
1	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran dan Pemotongan Tali Asih	ROO.23.06.10.02	Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap Pemberian Tali Asih agar tepat sasaran	Masih terdapat Tali Asih yang tidak tepat sasaran	Pemberian pelatihan kepada SDM dalam koordinasi dan pemantauan pemberian Tali Asih	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2024
2	Pemalsuan Dokumen	ROO.23.06.10.03	Melakukan validasi dokumen	Masih terdapat dokumen palsu	Meningkatkan pengawasan dan validasi dokumen	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2025
3	Kemungkinan Resiko Sosial Yang Lebih Besar lagi	ROO.23.06.10.04	Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat	Sosialisasi ke masyarakat kurang	Membentuk Tim sosialisasi	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2026
4	Pengadaan Buffer stock permakanan tidak sesuai spesifikasi dan Mark Up harga	ROO.23.06.10.05	Melakukan pendataan dan pengecekan terhadap Buffer stock sesuai spesifikasi	Anggaran yang terbatas, tidak sesuai harga yang disepakati	Memberikan pelatihan dan pembinaan terkait pengadaan Buffer stock	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2027

5	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan	ROO.23.06.10.06	Membuat kebijakan mengenai teknis administrasi kependudukan	Waktu yang terbatas	Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2028
6	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.07	Melakukan verifikasi data terhadap penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Anggaran yang terbatas, jumlah penerima manfaat bertambah dan berkurang	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2029
7	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.08	Melakukan verifikasi data terhadap penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Anggaran yang terbatas, jumlah penerima manfaat bertambah dan berkurang	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2030
8	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	ROO.23.06.10.09	Melakukan verifikasi data terhadap penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	Anggaran yang terbatas, jumlah penerima manfaat bertambah dan berkurang	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2031
9	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.10	Melakukan verifikasi data terhadap penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Anggaran yang terbatas, jumlah penerima manfaat bertambah dan berkurang	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2032
10	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.11	Melakukan verifikasi data terhadap penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Anggaran yang terbatas, jumlah penerima manfaat bertambah dan berkurang	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Kadis Sosdukcakil	Triwulan II Tahun 2033

Jambi.....
Sekretaris DIN SOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRASJID, S.Sos
Pembina TK.1 - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

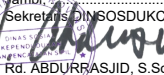
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Pemda Tahun Penilaian		: Provinsi Jambi : 2024					
Tujuan Strategis Pemda		: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Dilakukan Pendataan Keliling	Rapat Koordinasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dukcapil Kab/Kota	Triwulan I,II,III,IV Tahun 2024	-	-
2	Dilakukan penambahan anggaran	Rapat/Nota Dinas/Surat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, BPKPD	Triwulan III Tahun 2024	-	-
3	Membentuk Tim pembinaan dan sosialisasi	Rapat/Surat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Staf Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
4	Memberikan pemahaman dan sosialisasi pengendalian pengadaan	Rapat/Surat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Staf Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
5	Memberikan pelatihan dan pembinaan	Bimtek	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
6	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Rapat Evaluasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, BPKPD	Triwulan II Tahun 2024	-	-
7	Melakukan pembinaan bagi PSM Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Rapat/Surat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, BPKPD	Triwulan II Tahun 2024	-	-
8	Menambah anggaran fasilitas pendukung pelayanan dukcapil dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Rapat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
9	Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Bimtek	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
10	fasilitasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara intensif kab/kota dan berkoordinasi serta konsultasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota	Surat Edaran/Koordinasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
11	Memperkuat data dukung	Rapat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
12	Memperkuat data dukung	Rapat	Dinas Sosial,	Dinas Sosial,	Triwulan II Tahun	-	-
13	Diberikan pelatihan kepada SDM	Pelatihan	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
14	Pemberian pelatihan kepada SDM dalam koordinasi dan pemantauan pemberian Tali Asih	Pelatihan	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
15	Meningkatkan pengawasan dan validasi dokumen	Rapat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
16	Membentuk Tim sosialisasi	Rapat/Surat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
17	Memberikan pelatihan dan pembinaan terkait pengadaan Buffer stock	Pelatihan	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
18	Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Pelatihan	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
19	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Rapat Evaluasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
20	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Rapat Evaluasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
21	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	Rapat Evaluasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
22	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Rapat Evaluasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-
23	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Rapat Evaluasi	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Triwulan II Tahun 2024	-	-

Jambi, 15 Desember 2024
Sekretaris DINASOSDUKCAPIL

Rd. ABDURRAHMAN, S.Sos
Pembina TK.I - IV/b
NIP. 19690226 199403 1 002


Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		: Provinsi Jambi				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Dilakukan Pendataan Keliling	Konfirmasi Pelaksanaan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
2	Dilakukan penambahan anggaran	Konfirmasi Pengusulan Penambahan Anggaran	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
3	Membentuk Tim pembinaan dan sosialisasi	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
4	Memberikan pemahaman dan sosialisasi pengendalian pengadaan	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
5	Memberikan pelatihan dan pembinaan	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
6	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Konfirmasi Pengusulan Penambahan Anggaran	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
7	Melakukan pembinaan bagi PSM Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
8	Menambah anggaran fasilitas pendukung pelayanan dukcapil dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Konfirmasi Pengusulan Penambahan Anggaran	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
9	Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan

10	fasilitasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara intensif kab/kota dan berkoordinasi serta konsultasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
11	Memperkuat data dukung	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
12	Memperkuat data dukung	Konfirmasi Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
13	Diberikan pelatihan kepada SDM	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
14	Pemberian pelatihan kepada SDM dalam koordinasi dan pemantauan pemberian Tali Asih	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
15	Meningkatkan pengawasan dan validasi dokumen	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
16	Membentuk Tim sosialisasi	Konfirmasi Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
17	Memberikan pelatihan dan pembinaan terkait pengadaan Buffer stock	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
18	Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Konfirmasi Pelaksanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
19	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
20	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
21	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan

22	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan
23	Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Semester I	-	Telah dilaksanakan, Didokumentasikan dan didistribusikan

Jambi,
 Sekretaris DINSOSDUKCAPIL

 Rd. ABDURRASJID, S.Sos
 Pembina TK.I - IV/b
 NIP. 19690226 199403 1 002

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan


Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda		: Provinsi Jambi								
Tahun Penilaian		: 2024								
Tujuan Strategis		: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas. 2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
II Risiko Strategis										
1	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dalam pant	RSO.23.06.10.01					Dilakukan penambahan anggaran	Triwulan II		
2	Verifikasi tidak dilaksanakan dengan benar	RSO.23.06.10.02					Membentuk Tim pembinaan dan sosialisasi	Triwulan II		
3	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi	RSO.23.06.10.03					Memberikan pemahaman dan sosialisasi pengendalian pengadaan	Triwulan II		
4	Kemungkinan tidak tepat sasaran	RSO.23.06.10.04					Memberikan pelatihan dan pembinaan	Triwulan II		
5	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran	RSO.23.06.10.05					Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Triwulan II		
6	PSM belum mewakili desa/kelurahan domisi	RSO.23.06.10.06					Melakukan pembinaan bagi PSM Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Triwulan II		
7	Masih terbatasnya fasilitas pendukung di daerah guna peningkatan pelayanan Dukcapil	RSO.23.06.10.07					Menambah anggaran fasilitas pendukung pelayanan dukcapil dengan Kolaborasi anggaran Pusat dan APBD	Triwulan II		
8	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan aturan	RSO.23.06.10.08					Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Triwulan II		
9	Pelaksanaan PIAK di kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya	RSO.23.06.10.09					fasilitasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara intensif kab/kota dan berkoordinasi serta konsultasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota	Triwulan II		
10	Tidak tercapainya nilai target AKIP	RSO.23.06.10.10					Memperkuat data dukung	Triwulan II		
11	Tidak tercapainya nilai target IKM	RSO.23.06.10.11					Memperkuat data dukung	Triwulan II		
								Triwulan II		
III Risiko Operasional										
1	Tali Asih yang diberikan tidak tepat sasaran dan Pematangan Tali Asih	ROO.23.06.10.02					Pemberian pelatihan kepada SDM dalam koordinasi dan pemantauan pemberian Tali Asih	Triwulan II		
2	Pemalsuan Dokumen	ROO.23.06.10.03					Meningkatkan pengawasan dan validasi dokumen	Triwulan II		
3	Kemungkinan Resiko Sosial Yang Lebih Besar lagi	ROO.23.06.10.04					Membentuk Tim sosialisasi	Triwulan II		

4	Pengadaan Buffer stock permakanan tidak sesuai spesifikasi dan Mark Up harga	ROO.23.06.10.05					Memberikan pelatihan dan pembinaan terkait pengadaan Buffer stock	Triwulan II		
5	Belum maksimalnya kebijakan teknis administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan dan diselenggarakan dengan aturan	ROO.23.06.10.06					Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kebijakan teknis administrasi kependudukan	Triwulan II		
6	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.07					Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Triwulan II		
7	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.08					Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Anak Terlantar di dalam panti UPTD PSBAWEP	Triwulan II		
8	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	ROO.23.06.10.09					Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Lanjut Usia Terlantar di dalam panti UPTD PSTW "BUDI LUHUR	Triwulan II		
9	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.10					Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Triwulan II		
10	Jumlah Pengadaan tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	ROO.23.06.10.11					Dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap data penerima manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti UPTD PSBAWEP	Triwulan II		

Jambi,
 Sekretaris DINSOSDUKCAPIL

 Rd. ABDURRASJID, S.Sos
 Pembina TK-1 - IV/b
 NIP. 19690226 199403 1 002

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan